

**KEMENANGAN PETAHANA MELALUI STRATEGI POLITIK *PORK BARREL*
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA AMPELSARI TAHUN 2017**

Hasna Nur Rachmawati*) Laila Kholid Alfirdaus**) Nur Hidayat**)

Email: hasnanrahmawati@gmail.com alfirdaus_laila@yahoo.com nhsardini@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)7465407

Faksimile (024)7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Maraknya fenomena petahana kembali bertarung pada ajang kontestasi politik menyebabkan adanya kecenderungan pemanfaatan anggaran negara secara tidak etis. Berangkat dari hal itu penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran politik praktis *pork barrel* yang dilakukan oleh aktor eksekutif di pemerintahan lokal desa. Kasus penelitian berlatar belakang di pemilihan kepala desa Ampelsari tahun 2017 seorang petahana berhasil memenangkan hasil perolehan suara. Metode yang digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kombinasi etnografi untuk menghasilkan data yang komprehensif. Hasil penelitian, petahana memanfaatkan program bansos untuk kepentingan elektabilitas dengan memprioritaskan kelompok pendukung sebagai penerima manfaat; adanya diskrimansi sikap dalam pembangunan berbasis kewilayahan; keunggulan petahana atas posisinya yang strategis dimanfaatkan untuk menghimpun modalitas politik; dan politik uang. Hasil temuan lapangan memperlihatkan faktor-faktor pendukung yang menyebabkan petahana berhasil memperoleh kemenangan kembali untuk periode keduanya.

Kata kunci: petahana; *pork barrel*; modalitas politik; politik uang

Abstract

The rise of the incumbent phenomenon of returning to fighting in political contestation events causes a tendency to use the state budget unethically. Based on that, this research aims to provide a practical political picture of pork barrels carried out by executive actors in the local village government. A research case with a background in the election of the Ampelsari village head in 2017 an incumbent managed to win the results of the vote. The method used to meet research objectives is a qualitative method with a case study approach and an ethnographic combination to produce comprehensive data. As a result of the research, the incumbent uses the social assistance program for the benefit of electability by prioritizing support groups as beneficiaries; there is a discretion of attitudes in regional-based development; the superiority of the incumbent over his strategic position is used to collect political modalities; and money politics. The results of the field findings show the supporting factors that caused the incumbent to succeed in regaining victory for his second period.

Keywords: incumbent; pork barrel; political modalities; money politics

PENDAHULUAN

Hakikat asli kebijakan publik sebenarnya dibuat oleh negara sebagai bentuk keputusan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan publik dengan cara mengalokasikan sumber daya dan membaginya secara proporsional (Haliim 2019). Beragam topik kebijakan publik dibuat untuk memenuhi tujuan pembangunan nasional, satu dari sekian bentuk kebijakan yang konkrit menyangkut soal isu sosial kemasyarakatan adalah program bantuan sosial. Program bantuan sosial muncul sebagai manifestasi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan publik terkait kemiskinan. Lebih lanjut implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan terbagi menjadi beberapa kluster yakni kluster I berupa Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, kluster II Program Pemberdayaan Masyarakat, dan kluster III Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dimana masing-masing kluster memiliki pembagian jenis yang beragam (Papatung, Pih, and Waworundeng 2019).

Macam jenis bantuan sosial dibuat dengan maksud untuk mendorong dan mempercepat

produktivitas masyarakat agar lepas dari rantai kemiskinan yang berkepanjangan. Terdapat pembagian ranah anggaran untuk sumber dana pengadaan bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Pemerintah desa hadir sebagai sebuah refleksi dari entitas kelompok masyarakat desa yang diberikan pengakuan dan kewenangan khusus oleh negara untuk memimpin wilayahnya sendiri sebagai bentuk penghargaan atas kehidupan masyarakat yang berbudaya. Penetapan kewenangan terhadap desa bersifat otonom dan berasaskan subsidiaritas serta menjunjung tinggi hak asal-usul yang mengakar.

Lalu, otonomi desa dapat diartikan sebagai kewenangan dari masyarakat atau komunitas yang memiliki kuasa untuk mengorganisir diri mereka sendiri (Kushandajani 2017). Tak heran meski pemerintahan desa diberi ruang berekspresi secara terbuka para elit lokal turut memanfaatkan kesempatan untuk berkontestasi dalam panggung politik sebagai 'raja-raja kecil'. Marak terdengar permainan politik desa tidak kalah kolotnya dengan apa yang terjadi di pemerintahan nasional. Politik

diperalat sebagai arena permainan distribusi sumber daya oleh pemangku jabatan guna meraup keuntungan bagi kantong pribadi maupun golongan. Salah satu jalan menujunya adalah melalui politisasi kebijakan yang disisipi oleh agenda-agenda politis terselubung.

Kerap kali bansos dijadikan salah satu senjata politis calon kandidat untuk menarik simpatisan, karena melihat fakta bahwa pengadaan bansos menjadi sebuah trend ketika mendekati musim pemilihan. Lantas program bansos menjadi sasaran empuk politisi untuk menggaet dukungan suara dan meningkatkan elektabilitasnya yang seringkali melalui penerapan strategi politik *pork barrel*. Strategi ini menjadi andalan untuk mengamankan distribusi suara dengan cara-cara permainan alokasi sumber daya supaya dialokasikan pada wilayah konstituen.

Mengingat sistem pemilihan kepala desa yang demokratis secara langsung oleh masyarakat memungkinkan *pork barrel strategic* dimainkan oleh petahana. Citra baik seorang petahana dapat dicetak oleh pengaruhnya dalam program populis seperti bansos, ini sekalian diperalat

untuk mempertahankan dan mendongkrak suara pemilih pada pemilu berikutnya (Rahmanto et al. 2021). Kepala desa berperan aktif selama proses penyeleksian dan penyaluran bantuan sosial baik yang sumber dananya berasal dari pusat maupun dana desa. Sebagai pemimpin seorang kepala desa memiliki *power* untuk mengintervensi hasil keputusan musyawarah, atas kepemilikan *power* seorang pemimpin mampu medikte kebijakan dan memperoleh sumber daya lebih banyak.

Sejalan dengan itu, peneliti berasumsi kepala desa Ampelsari yang merupakan seorang petahana di pemilihan tahun 2017 melakukan politik praktis *pork barrel* dengan indikasi pemanfaatan program bantuan sosial. Program bansos diduga menjadi program populis yang diandalkan petahana untuk mengamankan distribusi suara dan menghimpun lebih banyak lagi pemilih. Menurut data Dinas Pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan pencatatan sipil, Provinsi Jawa Tengah jumlah penduduk Desa Ampelsari sebanyak 5.015 jiwa dengan mayoritas penduduk mengenyam pendidikan sampai tingkat sd sebesar 48.2% (sidesa.jatengprov,

2020). Mengetahui kondisi sosial ekonomi desa tergolong menengah maka isu bantuan sosial menjadi hal yang sensitif dalam perbincangan warga desa. Banyak masyarakat yang menilai bahwa pendataan dan penyaluran bansos tidak netral lantaran terdapat penilaian subjektif oleh pejabat desa yang dicampuri nilai kekerabatan. Berangkat dari lima wilayah RW dalam satu Desa Ampelsari di tiap-tiap wilayah tersebut banyak yang berkeluh kesah karena merasa tidak adil dalam perolehan bansos. Permainan politik pemimpin atas *power* yang dimilikinya menjatuhkan penilaian kelolosan kualifikasi penerima bansos bagi para pendukungnya saja.

Strategi pertahanan kekuasaan kepala desa disinyalir memanfaatkan penjatahan bansos reguler yakni PKH, dan BPNT, RT-LH serta program bantuan dari pemdes BLT-DD yang kuota penerimanya banyak diperuntukan untuk konstituen pendukung kepala desa. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini akan mendalami fenomena strategi politik *pork barrel* yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan jabatan eksekutif kepala desa Ampelsari. Analisis akan difokuskan

untuk membuktikan apakah politisi melakukan distribusi sumber daya berbasis kewilayahan pendukung. Sehingga dikerucutkan pertanyaan penelitian ini menjadi: bagaimana strategi *pork barrel* bekerja di ranah lokal desa; dan implikasi bagi kepala desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kombinasi diantara dua pendekatan yaitu studi kasus dan etnografi sehingga diperoleh data yang komprehensif. Data dan informasi diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Penggalan data primer dilakukan peneliti dengan wawancara mendalam. Guna memperoleh informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk memperoleh subjek penelitian yang berkapasitas memberikan informasi. Informan yang diwawancarai memiliki kategori diantara: pihak pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat desa, masyarakat pemilih, dan masyarakat bukan pemilih kepala desa M. Adapun awalnya kepala desa sebagai pemeran utama pada topik ini menutup akses ditengah proses negosiasi peneliti untuk mewawancarai beliau. Sehingga perangkat desa lain

ikut serta menolak dan menyulitkan akses kepada peneliti yang bertujuan menggali informasi.

Berikut informan yang memberikan akses peneliti untuk melakukan wawancara mendalam adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten DINSOSPPPA, secara khusus menasar Bidang PKH yang diwakili oleh informan Koordinator Kabupaten (Dimas) dan Pendamping Sosial (Sumiyati).
2. Tokoh masyarakat desa terdiri dari:
Perangkat desa (inisial S);
Perwakilan BPD (inisial Y);
Ketua RT (inisial H).
3. Masyarakat pemilih kepala desa:
Inisial (M), inisial (A), inisial (B),
inisial (O)
2. Masyarakat bukan pemilih kepala desa:
Inisial (N), inisial (S), inisial (P).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada temuan penelitian ini kepala desa Ampelsari telah berhasil memenangkan pemilihan umum sebanyak dua kali dan terindikasi menggunakan model *pork barrel* sebagai upaya meraup dukungan. Zohal Hessami (dalam Saragintan and Hidayat 2017)

menguatkan bahwa *local executive* yang dipilih secara langsung oleh masyarakat berkemungkinan melakukan strategi politik *pork barrel*. Dengan mengindahkan definisi *pork barrel* dari para peneliti terdahulu, penulis memilih konsep berpikir Saragintan dan Hidayat (2017) pada penelitiannya yang mengkaji *pork barrel* dengan pisau analisis: pertama menekankan bahwa pemimpin eksekutif menetapkan kebijakan daerah untuk mengalokasikan sumber daya dengan orientasi bersifat umum tidak tertuju pada kelompok khusus yang berkenaan dengan tujuannya agar dipilih kembali; dan terakhir mengutamakan basis wilayah sebagai karakter distribusi kebijakan.

Bentuk Politik Praktis *Pork Barrel*

1. Politisasi Program Bantuan Sosial Sebagai Sumber Daya Politik Transaksional

Fokus penelitian ini hanya akan mengulik distribusi bansos jenis PKH, BPNT, dan BLT-Covid. Tujuannya adalah untuk melihat adanya perilaku petahana yang memanfaatkan program bansos sebagai alat transaksional guna meraup dukungan suara atau tidak.

Program PKH, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial RI Pasal No 1

Tahun 2018 tentang PKH pada pasal 34, faktor perbedaan komposisi kuota setiap wilayah kepesertaan PKH dipengaruhi nilai dari data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah. Artinya, bila suatu daerah memiliki kuantitas kemiskinan yang tinggi akan berkorelasi pada banyaknya jatah bansos yang akan diloloskan Kemensos untuk wilayah tersebut. Regulasi ini yang kemudian membuka analisis peneliti terhadap bentuk *pork barrel* yang terindikasi dilakukan petahana dengan tolak ukur fakta sebagai berikut.

Ampelsari menjadi desa yang memperoleh jatah bansos terbanyak sejak tahun 2014 sd. 2023 dalam satu wilayah kecamatan (Bidang PKH, DINSOSPPPA Kab Banjarengara). Adapun faktor pertama yang mempengaruhi perolehan jatah bansos Ampelsari paling banyak dibandingkan wilayah lain karena desa ini tergolong zona merah kemiskinan. Keterangan ini diperoleh peneliti ketika mewawancarai pihak pemerintah kabupaten (pendamping sosial) dan perangkat desa (informan K). Meskipun, dari pihak kabupaten juga menambahkan konfirmasi bila Ampelsari sejatinya bukan tergolong zona kemiskinan ekstrem.

Faktor kedua adalah metode pengusulan calon penerima manfaat. Menurut pendamping sosial sejak awal pemerintah desa Ampelsari sudah banyak melakukan pengusulan calon penerima manfaat ke sistem DTKS. Pengusulan yang secara massif dilakukan mempengaruhi besaran data DTKS yang turun ditambah mekanisme untuk mengurangi jatah bansos yang cukup sulit. Beriringan dengan itu usulan-usulan baru yang terus disuguhkan sehingga dari tahun ke tahun Ampelsari masih menjadi urutan pertama sebagai penerima jatah terbanyak se-kecamatan. Analisis penulis dari kondisi ini adalah petahana memanfaatkan peluang perolehan jatah bansos PKH dengan dasar wilayahnya termasuk zona merah kemiskinan. Bukti wawancara yang mendukung argumentasi penulis adalah sebagai berikut.

“ ... Ampelsari memang yang masuk data pengusulan terbanyak sejak dahulu, jadi DTKS nya ketika turun pun memang banyak dan mungkin untuk menurunkannya itu yang sulit... sejak dari awal sampai sekarang masih terbanyak, kita menggunakan data di tahun ini 2023 Ampelsari masih terbanyak.”(Sumiyati-Pendamping Sosial, Wawancara 10 Juni 2023).

Permasalahannya, setiap data yang telah turun cukup sulit untuk

dikurangi (jumlah) mengingat mekanisme penghapusan data penerima manfaat dari DTKS cukup rumit.

Penerima manfaat PKH akan gugur sebagai peserta bila tidak memenuhi kelayakan, dimana ketidaklayakan ini akan terjadi diantara tiga: secara alami kehilangan komponen syarat; memiliki asset kekayaan; dan pengunduran diri (graduasi). Penghapusan penerima manfaat dari bank data DTKS akan dilakukan oleh pendamping sosial bersama dengan perangkat (*by sistem*).

Adanya kewenangan tersebut merupakan kebijakan baru untuk memotong alur birokrasi dengan harapan peningkatan efektivitas. Namun, pada implementasi di lapangan pendamping sosial mengakui kurangnya optimalisasi dan kedisiplinan eksekusi. Alasannya, bila penerima manfaat melakukan pengunduran diri (graduasi) secara otomatis akan kehilangan bantuan jenis lainnya. Keterangannya adalah sebagai berikut:

“Ini aturannya baru, dulu tidak ada kewenangan seperti ini. Pendamping sebelum saya sudah mulai mengeksekusi. Tetapi ini ada dampaknya, apabila graduasi secara mandiri maka bansos jenis lain yang diterimanya akan ikut terhapus

termasuk PKH, BPNT, KIS juga. Itu menjadikan pro kontra karena kebanyakan kasus, KPM sudah mau graduasi mandiri tetapi dia masih membutuhkan KIS untuk perawatan rutin kesehatan misalnya itu jadi permasalahan... Kalau berbicara graduasi secara mandiri itu memang sangat membutuhkan kesadaran diri, kaitannya dengan hati dan rasa syukur jadi kita tidak bisa memaksakan meskipun kita punya kuasa untuk melakukan graduasi secara paksa dengan pihak desa.” (Sumiyati-Pendamping Sosial, Wawancara 10 Juni 2023).

Untuk membuktikan adakah upaya terselubung pihak pemerintah desa memanfaatkan peluang perolehan jatah (bansos), peneliti berusaha menggali informasi ke pihak yang terlibat pada pengelolaan bansos informan (K). Hasilnya pihak informan K mengakui pihaknya melakukan pengusulan calon penerima manfaat secara massif dengan maksud dan tujuan agar merepresentasikan kemiskinan di desanya tinggi sehingga menerima jatah bansos PKH lebih banyak.

“Data dulu penduduk miskin Ampelsari paling banyak, walaupun kalau dilihat faktanya sama dengan desa lain. Cuma dulu daftar DTKS paling banyak, disini termasuk zona merah kemiskinan secara angka kalau secara fakta engga beda dari desa tetangga. Dulu sebelum saya disini yang mengusulkan itu kan banyak-banyakkan, jadi yang paling banyak dianggap paling miskin supaya

bisa diloloskan.” (K-Tokoh Masyarakat, Wawancara 16 Februari 2023).

Kesimpulan wawancara peneliti dengan pendamping dan koordinator Bidang PKH menegaskan peran aktif pemerintah lokal (kelurahan dan desa) sangat dibutuhkan dalam proses distribusi. Sebagai aparat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat mereka bertindak sebagai penyalur dan pengawas bansos. Utamanya pada penyaluran apabila pemerintah (kelurahan/desa) tidak aktif memperbaharui data atau pengusulan maka perolehan jatah bisa jadi sangat kecil. Sehingga tolak ukur *pork barrel* dalam fenomena distribusi PKH ini dititik beratkan pada pengusulan yang secara massif dilakukan pihak desa.

Kedua distribusi bansos Non-PKH. Selain dari program PKH peneliti mencari bukti-bukti pemanfaatan program bansos oleh petahana dengan meninjau distribusi BPNT dan BLT Covid. Peneliti menekankan pada pemaparan kasus distribusi non-PKH tidak ada rekam data baik secara jumlah dan waktu. Meski terdapat keterbatasan pada akses data sekunder yang mendukung, peninjauan tetap dilakukan dengan

dasar acuan data primer dari cerita informan. Maka dari itu, penulis melibatkan wawancara dengan beberapa pihak yaitu pemerintah desa (informan K), tokoh masyarakat (H) dan (Y), dan masyarakat awam. Secara garis besar ketiga pihak menyetujui anggapan bahwa penerima bansos di Ampelsari secara menyeluruh cukup banyak baik secara jumlah dan jenis.

Pertama dari pihak pemerintah desa (informan K) yang merupakan perangkat sekaligus penduduk asli desa mengutarakan bila desanya memperoleh banyak jenis bansos dan sebaarannya cukup merata. Kecakapan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan program bansos dari pemerintah pusat berhasil meninggalkan kesan baik di mata masyarakat desa. Poin pemerataan bansos ditangkap masyarakat sebagai daya tarik yang dimiliki kepala desa. Pada kesempatan wawancara informan (K) memberikan informasi yang menjadi indikasi *pork barrel* dengan bentuk kecenderungan petahana yang mengupayakan kelompok pendukung agar dipertahankan menjadi penerima manfaat.

“... (strategi) Banyak memberikan bantuan sosial, karena Desa Ampelsari

ini banyak sekali menerima kuota bantuan sosial baik jenis RTLH, jamban sehat, bantuan pangan non-tunai, BLT, PKH...semua orang dikasih cuma itu kan ganti-ganti nama penerimanya, tetapi kalau dia (penerima) mengusulkan diri atau diusulkan dan memiliki hubungan dekat (dengan Kades) tetap dipertahankan supaya menerima.” (K-Tokoh Masyarakat, Wawancara 16 Februari 2023).

Kedua, tokoh masyarakat H dan Y menyatakan hal yang serupa bila bansos ini menjadi isu publik dan rahasia umum bila desanya dikenal banyak menerima bansos. Tambahnya, tokoh H menilai salah satu upaya petahana untuk meningkatkan citra politisnya dengan memanfaatkan peluang atas kekuasaannya sebagai kepala desa.

“Bertambah (pendukung) itu karena dia mengajukan bantuan dan program-program dari pemerintah itu lah dimanfaatkan beliau untuk mencari orang supaya mendukung dia. dengan iming-iming kalo memilih dia nanti bisa lah itu dapat bantuan.” (H-Tokoh masyarakat, Wawancara 27 Februari 2023).

“Iya memang terkenal desa Ampelsari banyak yang menerima bansos, tapi itu kan data dari pusat. Saya kira hampir sama di setiap desa. Mungkin juga karena salah satu faktornya warga disini banyak.” (Y-Tokoh masyarakat, Wawancara 18 Maret 2023).

Sebagai upaya memperdalam bukti penerapan *pork barrel* peneliti berupaya menganalisis silang informasi yang diperoleh dari masyarakat awam kelompok pendukung kepala desa dan bukan pendukung. Hasilnya menurut kelompok pendukung, kepala desa cukup berhasil memenuhi pemerataan program bansos di Ampelsari. Pihaknya mengakui desa ini menjadi desa yang terkenal memperoleh jatah bansos paling banyak dibanding desa lain. Di pihak yang bersebrangan kelompok bukan pendukung memberi penilaian yang sedikit berbeda ditambahnya hanya terdapat kecenderungan kerabat atau orang yang berhubungan baik memiliki akses informasi eksklusif dan prioritas untuk menerima pelayanan atau bansos. Sisanya mengenai tren pemerataan bansos dan fakta di lapangan bahwa warga yang menerima bansos itu banyak memang benar adanya. Berikut kutipan wawancara dari informan (N dan P) yang berlatar belakang bukan pemilih kepala desa dan belum pernah menerima manfaat bansos regular PKH maupun Non-PKH. Temuan berikut juga memperkuat indikasi pengutamaan kelompok pendukung sebagai penerima manfaat bansos, terbukti dari cerita jujur yang diberikan informan berinisial (P)

yang menjadi calon penerima RTLH dan telah di survey langsung oleh kepala desa serta perangkat namun tidak lolos. Upaya *cross check* peneliti juga dilakukan terhadap ketua RT setempat yang kemudian menceritakan latar belakang ekonomi informan P yang rentan miskin. Pihak yang akhirnya menerima RTLH di lingkungan tempat tinggal P tidak memberikan akses untuk peneliti melakukan wawancara.

Menariknya di RW yang sama dengan kediaman informan (P) terdapat kasus yang sama mengenai bansos RTLH, bedanya akses bantuan untuk rumah diperoleh dari sumber DAK Fisik. Peneliti berhasil memperoleh akses untuk mewawancarai pihak tersebut yang diinisialkan (A). Menurut penuturannya ia dan satu keluarga menjadi pemilih kepala desa tanpa ada alasan selain pandangannya yang menilai kepemimpinan kades cukup baik.

Beralih pada pembahasan distribusi BLT Covid, secara garis besar penulis tidak cukup memperoleh bukti yang akurat bila terdapat alokasi bersifat diskriminatif untuk kelompok pendukung. Mayoritas subjek yang berkaitan menyatakan pada waktu pandemi sebaran BLT Covid merata

dan menyentuh orang-orang yang tidak atau belum pernah menerima bansos. Meskipun terdapat satu informan yang menyatakan terdapat perubahan nama calon penerima BLT Covid yang dicurigai dilakukan kepala desa bersama jajaran. Namun, pernyataan ini tidak berhasil dibuktikan, ujarnya adalah sebagai berikut.

“Untuk BLT covid ini memang yang menerima non-PKH jadi memang untuk orang lain, tetapi dominan yang punya hubungan kekeluargaan. Contoh kan nanti yang memutuskan kades setempat, dari RT sudah mengusulkan warga-warganya, kemudian dirapatkan dengan BPD, kades dan perangkatnya. Kemudian ini akan terjadi antaranya kepala desa dengan kades setempat untuk menyeleksi BLT Covid. Karena pernah terjadi gini saya mendatangi ketua BPD nya saya mengusulkan warganya, Alhamdulillah diacc disitu dan dirapatkan dan dinyatakan InsyaAllah akan segera mendapat BLT. Tetapi disana ada perubahan lah perubahan itu intern datang dari kades dan kades, kadang bisa jadi ya kadesnya yang mbuang (membuang nama-nama tertentu) ya kadang kadesnya yang mbuang yang disenangi lah (warga yang dipilih).” (H-Tokoh Masyarakat, Wawancara 27 Februari 2023).

Penelusuran lebih lanjut penulis mewawancarai pihak kedua yaitu BPD sebagai pihak yang terlibat dan ikut bertanggungjawab atas proses distribusi BLT Covid. Menurut informan dari BPD proses seleksi berjalan adanya,

dalam artian mencoret nama-nama warga yang diusulkan itu wajar untuk menimbang kondisi ekonominya bila disepakati tidak layak menerima bantuan. Seleksi ini didasari dari kondisi sosial ekonomi calon penerima yang dilaporkan oleh RT atau warga terdekat. Pencoretan nama pada forum disaksikan oleh seluruh peserta forum yang hadir, baik perangkat desa, termasuk kadus, anggota BPD, dan unsur masyarakat. Namun, yang berhak memberi suara atau *voting* hanya perangkat desa dan anggota BPD.

Cross check peneliti dilakukan dengan para informan pihak ketiga yang merupakan masyarakat awam menghasilkan temuan bahwa BLT Covid berhasil menyentuh banyak lapisan masyarakat. Sumber dana untuk BLT Covid juga terbuka dari tiga pintu pemerintahan yaitu provinsi, kabupaten, dan desa. Berikut bukti wawancara penulis dengan penerima BLT Covid yang merupakan bukan kelompok pendukung kepala desa dan bukan penerima manfaat bansos regular.

Kaitannya dengan konteks *pork barrel*, penulis memastikan adanya kecenderungan alokasi anggaran secara khusus BLT Dana Desa (BLT-D D)

untuk kelompok tertentu atau tidak dan apakah besaran anggaran tersebut diluar dari standar yang ditetapkan pemerintah pusat atau tidak. Mengacu pada Permendesa No 6 Tahun 2020 mengatur bila desa tergolong penerima dana desa (DD) kurang dari 800 juta maka maksimal alokasi anggaran untuk sebesar BLT 25% dari DD keseluruhan. Desa Ampelsari tergolong pemerintahan yang menerima transfer DD kurang dari 800 juta sehingga perhitungan untuk alokasi BLT diambil maksimal sebesar 25% di tahun 2022. Kekurangan pada penelusuran ini, penulis hanya memperoleh informasi besaran alokasi untuk BLT-DD hanya di tahun 2022. Keterangan dari informan adalah sebagai berikut.

“Tidak, pengeluaran terbesar dari pembangunan infrastruktur. BLT-DD diusulkan atas pembahasan bersama BPD. Angka BLT-DD tahun 2022 itu 25% kalo sekarang minimal 10-25%” (K-Tokoh Masyarakat, Wawancara 16 Februari 2023).

Pada kasus BLT-Covid penulis tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan pengecualian distribusi terhadap kelompok pendukung dan bukan pendukung. Tidak ada upaya pengutamaan secara khusus karena bukti primer menguatkan distribusi BLT Covid secara merata ke semua

kelompok masyarakat. Artinya, indikasi *pork barrel* tidak ditemukan pada kasus BLT Covid.

2. Politik Anggaran

Periode pertama kepemimpinan M sebagai kepala desa dimulai di tahun 2012, ditengah keberjalanannya UU yang memperkuat tata kelola pemerintahan desa yaitu UU No. 6 Tahun 2014 disahkan. Satu tahun kemudian terjadi penetapan sumber dana baru untuk desa yang berasal dari APBN dan ditransfer oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten/kota. Dana ini yang kemudian disebut alokasi dana desa atau DD. Momentum ini pula yang menjadi sumber kewenangan baru bagi kepala desa untuk memegang kendali atas pengelolaan keuangan desa. UU dan PP menegaskan dana desa diakomodir untuk membiayai program di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lintas bidang baik seperti BUMDesa, dengan memperhatikan efisien, ekonomi, keadilan, dan mempertanggungjawabkan hasil program kepada masyarakat desa.

Dalam rangka mencari bukti adanya indikasi politik distributif yang bersifat diskriminatif penulis mencari

jejak pendapat para informan terhadap pandangannya atas bukti pembangunan yang dilakukan selama dibawah kepemimpinan kepala desa M. Hasilnya mayoritas mengungkapkan bahwa pembangunan berjalan cukup signifikan. Menurut informasi pembangunan secara fisik yang telah terpenuhi kurang lebih pengaspalan jalan utama desa, jalan-jalan perkampungan, penerangan jalan, dan sistem pengairan. Perihal pemberdayaan ekonomi diantaranya diwujudkan melalui kegiatan lintas bidang BUMDesa, dan pengajuan bantuan dana untuk UMKM.

Meski para informan tidak memungkiri adanya pembangunan yang konkrit tetapi mereka juga tidak menghilangkan anggapan diskriminasi prioritas yang dicurigai berdasar pada basis kewilayahan. Bukan tanpa alasan kecurigaan publik didasari oleh hasil perolehan suara dari setiap (Tempat Pemilihan Suara) TPS yang mewakili masing-masing RW. Bukti secara fisik pasca pemilihan 2017 terdapat adanya perbedaan prioritas dalam alokasi sumber daya pembangunan satu yang menonjol pada jalan Petambakan-Ampelsari RW 02.

Penulis memperoleh informasi bahwa wilayah tersebut merupakan basis pendukung lawan politik kepala desa M dari bakal calon berinisial (I). Namun, pihak-pihak yang terlibat pada proses politik anggaran desa mengakui tidak menemukan alasan konkrit kepala desa tidak menyentuh pembangunan jalan Petambakan-Ampelsari lebih awal.

Anggapan ini muncul dari persepsi masyarakat. Karena, pemilihan kepala desa 2017 merupakan pertama kalinya peletakkan TPS berada disetiap domisili RW, artinya satu TPS untuk satu RW. Sehingga dari hasil suara yang diumumkan masyarakat luas dapat dengan mudah menganalisis wilayah mana saja yang menjadi basis pendukung keempat calon kandidat. Petahana M yang berhasil meraup suara tertinggi mendapat dukungan terbanyak dari RW 05 dibandingkan RW lain yang tidak menyumbang suara secara signifikan.

Hasil penelusuran bentuk praktis *pork barrel* pada kasus prioritas pembangunan ini diawali dari proses politik anggaran, selayaknya pelaku pemerintahan ketika merumuskan kebijakan dimulai dari perencanaan yang bertahap. Aspirasi yang dirasa mendesak akan masuk ke urutan prioritas agar segera mendapat tindakan yang tepat. Pada pemilahan prioritas ini aktor politik dapat menyisipkan kepentingannya agar terakomodasi sampai pada tahap konsensus (Hamka, et al 2022). Satu bentuk praktis *pork barrel* yang secara fisik dikonfirmasi oleh para informan adalah sebagai berikut.

“Contohnya jalan Tambakan-Ampelsari, itu kan lama tidak diperbaiki. Nah dulu disana ada calon atau lawannya bila dipandang ya karena hal itu jadi lama dibiarkan jalannya rusak parah. Tapi secara detail alasannya kenapa tidak segera diperbaiki tidak ada yang tahu. Baru diperbaiki itu kemarin-kemarin ini. Jadi, karena wilayah lawan politik mungkin ya seperti itu.” (Y-Tokoh Masyarakat, Wawancara 18 Maret 2023).

Cerita jujur yang diberikan para informan menyetujui bila jalan Petambakan-Ampelsari memang paling lama tidak tersentuh pembangunan. Peneliti memfokuskan bukti pendukung *pork barrel* pada jalan RW 02,

alasan karena melalui teknik pengumpulan data observasi pengamatan dan keterlibatan peneliti pada situs penelitian menemukan fakta jalan yang dimaksud benar adanya tidak tersentuh pembangunan sejak lama.

Implikasi Politik Praktis *Pork Barrel*

Hubungan Petahana dengan kelompok PKH

Distribusi PKH lekat berkoordinasi dengan pemerintah desa sehingga hubungan antar *stakeholders* terjalin secara terus menerus. *Stakeholders* yang dimaksud adalah kepala desa, perangkat desa, kadus, ketua kelompok PKH dan pendamping sosial. Bila ditelisik lebih jauh, hubungan erat yang terjalin diantara pemerintah desa dengan kelompok PKH menjadi salah satu penyumbang modalitas politik petahana. Pada persepektif modal politik dan sosial bila semakin luas jaringan yang berhasil dibangun dan menghasilkan hubungan yang baik maka semakin kuat dukungan politik.

Informan yang berkategori masyarakat awam pemilih kepala desa sekaligus penerima manfaat PKH

memberikan keterangan bahwa hubungannya dengan kepala desa terjalin cukup dekat dan adanya loyalitas dengan kelompok PKH.

“Saya si milih (kepala desa)...alasan saya milih karena saya kader biar komunikasinya gampang, terus sama-sama perempuan lebih enak ngomongnya. Kaya kemarin ada lomba gitu dikumpulin diajak makan terus kalau minta apa misalnya seragam gitu ya ngomongnya lebih enak coba kalo ke bapak-bapak.” (M-Warga Desa, wawancara 26 Januari 2023).

Bukti lain yang mendukung relasi ini memiliki sifat saling menguntungkan diceritakan oleh tokoh masyarakat dengan kutipan berikut.

“...dari anggota PKH disini kan sudah 568, nah kemarin sudah mengatakan yang namanya verifikasi dari verifikasi itu kan cuma dibutuhkan 300 atau 250 kemarin juga dirapatkan kan, tapi sampai sekarang ini verifikasi tsb belum sampai validasi. apalagi ini untuk menjelang dia katanya akan mencalonkan diri kembali, nah dari 568 tsb itu kan sudah dikecam kalau tidak milih saya nantinya saya akan coret dari PKH itu seperti itu politiknya... Ketika itu ada rapat PKH, kan ada pertemuan-pertemuan dengan PKH tiap masing-masing dukuh, dari anggota PKH banyak sekali yang bercerita seperti itu.” (H-Tokoh masyarakat, Wawancara 27 Februari 2023)

Analisis dari fenomena yang disebut informan H adalah hubungan diantara tiap individu yang menerima bansos PKH dengan petahana bersifat saling membutuhkan. Setiap entitas memiliki daya tawar berupa hak suara dan kekuasaan.

Kombinasi Kampanye Politik di Tingkat Desa: Pork Barrel dan Politik Uang.

Pemilihan kepala desa tahun 2017 bukan menjadi tahun pertama strategi politik uang diterapkan oleh para calon kandidat kepala desa. Menurut salah satu keterangan informan fenomena ini sudah membudaya jauh sebelum kepemimpinan petahana M biasa dikenal *muwur amplop*. Para calon kandidat meyakini politik uang sebagai satu instrument yang wajib dilakukan menjelang pemilihan. Kondisi ini secara tidak langsung memicu persaingan sengit antar tim kampanye yang saling berlomba memberikan nominal yang paling besar. Fakta yang menarik adalah petahana M merupakan kandidat yang mampu memberikan penawaran nominal paling besar bahkan sejak pemilihannya di periode pertama.

Beragam persepsi masyarakat muncul dari fenomena ini, ada tipe

masyarakat yang secara terbuka menerima uang dengan anggapan bila menerimanya bukan suatu pelanggaran dan tindakan yang akan berdampak besar, masyarakat yang demikian tidak lagi menghiraukan perkara hukum maupun moral. Tipe kedua adalah masyarakat yang tidak mau menerima selain dari kandidat yang didukung olehnya, dan terakhir adalah sebagian masyarakat yang menolak sama sekali bentuk politik uang. Perspektif masyarakat desa menanggapi fenomena politik uang dipengaruhi oleh kesadaran politik dimana secara keseluruhan mayoritas warga desa kurang memiliki kesadaran tersebut.

Hal ini dikarenakan kecenderungan sikap warga yang acuh terhadap visi misi kandidat calon kepala desa. Masyarakat belum memiliki kecerdasan dan kepekaan terhadap politik, konteksnya dengan pragmatis ini mereka tidak memikirkan akibat jangka panjang atas perilaku mereka yang terbuka dan menerima politik uang. Pikirnya tidak akan mencederai nilai demokrasi dan tidak akan menciptakan pemerintahan yang buruk padahal sebaliknya, atas tindakan tersebut mereka turut menyingkirkan kandidat

calon yang layak secara kompetensi namun kalah dalam hal materi.

Atas dasar kondisi tersebut maka penulis mengidentifikasi satu faktor kemenangan petahana juga dipicu oleh besarnya uang yang diberikan. Modal ekonomi petahana cukup kuat dilihat dari kekayaannya, berbagai informan menuturkan bahwa keluarga petahana merupakan keluarga terpandang yang berkecukupan secara ekonomi. Masyarakat mengenal dengan istilah *juragan*, juragan pada konteksnya diartikan sebagai orang yang dianggap berkuasa karena memiliki harta dan kekayaan yang tinggi melebihi rata-rata ekonomi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa fenomena politik *pork barrel* dapat bekerja di ranah pemerintahan desa yang dilakukan oleh aktor eksekutif yaitu kepala desa. Hasil temuan secara keseluruhan mampu menjawab pertanyaan penelitian bahwa petahana terindikasi memanfaatkan program bansos. Metodenya adalah dengan memperbesar perolehan jatah bansos dan mendistribusikannya secara kolektif dengan harapan dipertukarkan oleh dukungan suara. Secara khusus bansos

yang dimanfaatkan adalah jenis bansos regular dan sebagian kecil bansos non-regular seperti BLT, dan RTLH.

Temuan lain yang mendukung faktor kemenangan petahana adalah kepemilikan modalitas politik yang kuat dan lebih mendominasi dibandingkan dengan lawan politiknya. Modal politik dan sosial petahana diuntungkan dari posisinya yang strategis berinteraksi langsung dengan para individu yang memiliki kuasa, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa. Modal ekonomi berupa kekayaan pribadi milik petahana beserta kerabat terdekatnya menempatkan keluarganya sebagai warga yang berstatus sosial sebagai *juragan*. Isitilah *juragan* dimaknai sebagai orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan sehingga cenderung lebih disegani oleh masyarakat desa.

SARAN

Berangkat dari keresahan publik yang diwakili oleh para informan serta dengan dasar pertimbangan nilai etis, berikut saran yang dapat diberikan peneliti :

1. Masih diperlukan pengawasan dalam proses distribusi dan pemeriksaan secara berkala

untuk memvalidasi keabsahan syarat penerima manfaat program bansos regular khususnya non-PKH yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau diwakili pemerintah kabupaten/kota.

2. Diperlukan peninjauan secara langsung dan menyeluruh dari pihak pemerintah desa kepada warga yang diajukan sebagai calon penerima manfaat.
3. Partisipasi politik masyarakat untuk ikut serta mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintahan desa perlu ditingkatkan dengan menguatkan basis kelompok kepemudaan dan atau tokoh masyarakat.
4. Mengenai fenomena politik uang membutuhkan komitmen dan konsistensi seluruh pihak dalam hal ini pemerintahan, organisasi masyarakat, instansi pendidikan, dan masyarakat di Ampelsari untuk meningkatkan kecerdasan berpolitik.

KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti mengakui bila studi ini memiliki keterbatasan, harapannya studi

lain yang nantinya turut melengkapi referensi akademis berkaitan dengan pembahasan *pork barrel* dan pemilihan kepala desa mampu memperbaiki kekurangan dari penelitian terdahulu.

1. Keterbatasan narasumber
Peneliti tidak berhasil memperoleh akses untuk mewawancarai kepala desa. Kemudian, beberapa pihak tokoh desa dan perangkat desa yang dituju peneliti menolak akses untuk memberikan informasi dengan alasan sensitivitas topik. Sehingga, keterbatasan akses tersebut mengurangi hasil analisis data secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2003. "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*.
https://www.academia.edu/7746825/Teknik_Pengumpulan_dan_Analisis_Data_Kualitatif_1.
- Alfaz, Perhat, and Suswanta Suswanta. 2021. "Bentuk Dan Jaringan Patron-Klien Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tasikmalaya." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 2(3): 170–83.
- Astuti, Puji, and Neny Marlina. 2022. "Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa : Benarkah Penentu Pilihan Bagi Pemilih ?" 7(2).

- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. "Politik Anggaran Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42(1): 51–64.
<http://jmi.ipisk.lipi.go.id/index.php/jmiipisk/article/view/359>.
- . 2017. "The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund." *Jurnal Penelitian Politik* 13(2): 193–211.
- Ekowati, Endah Yuli. 2019. "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." *Jurnal Transformatif* 5(1): 16–37.
- Fitri, Adelia. 2019. "Dinasti Politik Pada Pemerintahan Di Tingkat Lokal." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(1): 91–111.
- Haili. 2009. "Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Desa Pekandangan Barat Bluto Sumenep Madura)." *Jurnal Humaniora (Lemlit UNY)* 14(2): 99–112. ???
- Haliim, Wimmy. 2019. "PROGRAM DANA HIBAH DALAM PERSPEKTIF POLITIK DISTRIBUTIF: STUDI KASUS PRODAMAS KOTA KEDIRI Studi Kasus Prodamas Kota Kediri." *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (June).
- Hamka, Muh., Sakinah Nadir, and dan Haryanto. 2022. "Politik Anggaran Dan Relasi Aktor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." 10(1).
- Hamka, Muh., Sakinah Nadir, and Haryanto. 2022. "Politik Anggaran Dan Relasi Aktor Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah." *Jurnal Politik Profetik* 10(1): 79–98.
- Hanida, Rozidateno Putri. 2010. "KASUS PROSES PENETAPAN PROGRAM DAN ALOKASI The Article Is a Study of the Dynamics of Local Budget Arrangement Especially in the Process Ofprogram de Cision and Local Budget Expenses Allocation in Sleman Region Other Dynamics in This Study Is the Establish."
- Harsasto, Priyatno. 2014. "POLITIK SIKLUS ANGGARAN LOKAL (STUDI APBD KOTA SURAKARTA MENJELANG PILKADA 2010) Priyatno Harsasto." *Politika* 5(1).
- Harsasto, Priyo. 2014. "Politik Siklus Anggaran Lokal (Studi APBD Kota Surakarta Menjelang PILKADA)." *Politika* 5(Oktober): 1–12.
- Hidayat, Endik, Budi Prasetyo, and Setya Yuwana. 2019. "Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri." *Jurnal Politik* 4(1): 53.
- Hidayat, Rochmat. 2018. "MENIMBANG STRATEGI PEMILIHAN KEPALA DESA: STRATEGI SOSIALISASI POLITIK KEPALA DESA TERPILIH DESA BOJONG KULON KABUPATEN CIREBON." *SOSFILKOM* XII(1): 5–24.
- Khoiriah, Siti et al. 2017. "ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN

- DANA DESA BERDASARKAN.”
(1).
Universitas Sam Ratulangi.” 1(1):
1–12.
- Kushandajani. 2017. “Implikasi Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2(1): 53–64.
- Liando, Daud M. 2016. “Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014).” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3(2): 14–28.
- Lubis, Rudianto. 2021. 1
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26038>.
- Maman, Maman, Dede Sri Kartini, and Neneng Yani Yuningsih. 2017. “Agenda Setting Dalam Proses Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.” *CosmoGov* 2(1): 66.
- Nur, Andi Cudai dan Guntur, Muhammad. 2001. “Analisis Kebijakan Publik.” *Analisis Kebijakan Publik* (April): 165.
- Pakaya, Jefri S. 2016. “The Provinding of Authority to Village In The Conctect of Regional Autonomy.” *Legislasi Indonesia* 13(01): 80.
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/143/pdf>.
- Paputungan, Saiful, Novie Pioh, and Welly Waworundeng. 2019. “Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No. 1 Tahun 2019 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi.” 1(1): 1–12.
- Press, Wimaya. 2008. 104 *Eko Murdiyanto*.
- Purwanto, Agus. 2016. “Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 16, No. 2(2): 87–96.
- Rahmanto, Fajar, Muchammad Iqbal Firmansyah, Titin Purwaningsih, and M. Rafi. 2021. “Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas.” *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 6(1): 26.
- Ramadhan, Gilang. 2020. “Pilkada Bekasi Dalam Dilema Patron Klien: Antara Sosiologi Politik Dan Pemilih Rasional.” *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 2(1): 18–31.
- Saragintan, Antonius, and Syahrul Hidayat. 2017. “Politik Pork Barrel Di Indonesia: Kasus Hibah Dan Bantuan Sosial Di Provinsi Banten Tahun 2011.” *Jurnal Politik* 2(1): 137.
- Sektiono, Tri., Warganegar, Arizka., and Kurniawan, R. C. 2022. “KEKUATAN MODAL DALAM PEMILIHAN BUPATI WAY KANAN 2020.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(11).
- Sidiq, U, Choiri, M & Mujahidin, A. 2019. *METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN*. Cetakan Pe. ed. Anwar Mujahidin. CV. Nata Karya.

Sirajuddin, I A. 2014. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DASAR BIDANG SOSIAL DI KOTA MAKASSAR." *Jurnal Administrasi Publik* 4(1): 1–14.

Suwitri, Sri. 2010. "Konsep Dasar Kebijakan Publik." *Atmospheric Environment* 42(13): 2934–47.

Tetepa, Benasto. 2016. "KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA." IV(8): 70–78.

Tomoning, Yeremias. 2010. "Politik Lokal Desa." 2010(72): 1–21.

Windiani, and Farida Nurul. 2016. "Menggunakan Metode Etnografi Dalam Penelitian Sosial." *Dimensi jurnal sosiologi* 9(2): 87–92.

Yuliani, Krista, and Hendra Try Ardianto. 2020. "Bagaimana Kandidat Minoritas Memenangkan Pilkada: Analisis Strategi Politik Dalam Bingkai Bourdieusian." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5(1): 58–69.

website

Agregat Kabupaten, Kecamatan, Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah diakses melalui <https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.04.06.2002>

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Panduan Pendataan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)*. Diakses melalui https://sikompak.bappenas.go.id/pustaka/download/488/id/2020_Panduan%20Pendataan%20Keluarga%20Miskin%20Calon%20Penerima%20Bantuan%20Langsung%20Tunai-Dana%20Desa%20%28BLT-Dana%20Desa%29.pdf 20.08.2023.

<https://kbbi.lektur.id/petahana>

<https://banjarnegarakab.bps.go.id/>

perundang-undangan

UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>

UU No 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin Bagian Kedua tentang Pendataan Fakir Miskin Pasal 8 ayat 7

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.6 Tahun 2020 Tentang Perubahan PERMENDESA No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020